

**INDONESIA**  
**&**  
**PERDAGANGAN**  
**INTERNASIONAL**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# INDONESIA & PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.  
Yennie Agustin, M.R., S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**INDONESIA & PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**Penulis:**

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.  
Yennie Agustin, M.R., S.H., M.H.

**Desain Cover & Layout**

Pusaka Media Design

viii + 73 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Oktober 2020

**ISBN: 978-623-6569-51-1**

Penerbit

**PUSAKA MEDIA**

**Anggota IKAPI**

**No. 008/LPU/2020**

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : [cspusakamedia@yahoo.com](mailto:cspusakamedia@yahoo.com)

Website : [www.pusakamedia.com](http://www.pusakamedia.com)

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Perdagangan secara internasional menimbulkan siklus ekonomi yaitu ada penjual dan pembeli. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia.

Aktivitas perdagangan internasional menghilangkan sekat-sekat antar Negara. Meskipun demikian, antisipasi tetap perlu dilakukan. Hal ini mengingat terdapat perbedaan yang sangat mendasar yang melatarbelakangi timbulnya perdagangan internasional, perbedaan sistem hukum, politik hukum dan politik ekonomi di antara negara pelaku perdagangan internasional, dll.

Buku ini mengupas tentang sejarah dan perkembangan hukum perdagangan internasional, relevansi dan kemanfaatan serta kebijakan politik ekonomi Indonesia di era perdagangan bebas. Sebagai bahan awal buku ini diperuntukkan bagi siapa saja penstudi di lingkungan kampus di berbagai fakultas yang ingin mendalami persoalan politik ekonomi khususnya terkait dengan kebijakan perdagangan internasional.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkenan memberikan beberapa catatan pada naskah awal buku ini, hingga akhirnya diterbitkan oleh penerbit dan hadir di tengah-tengah pembaca. Dengan berbagai kekurangannya, semoga nanti dalam edisi berikutnya dapat disempurnakan.

Bandarlampung, Oktober 2020

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Yennie Agustin, M.R., S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I MANFAAT DAN RELEVANSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>1</b>
1.1 Sejarah dan Perkembangan Perdagangan Internasional .....	1
1.2 Relevansi dan Manfaat Perdagangan Internasional	8
1.3 Teori Perdagangan Internasional .....	14
<b>BAB II GLOBALISASI EKONOMI DAN BLOK PERDAGANGAN .....</b>	<b>16</b>
2.1 Globalisasi Ekonomi, Pro dan Kontra .....	16
2.2 Blok Perdagangan dan Lembaga Keuangan Internasional .....	24
<b>BAB III INDONESIA DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL</b>	<b>36</b>
3.1 Perdagangan Internasional sebelum Reformasi .....	36
3.2 Perdagangan Internasional sesudah Reformasi .....	47
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>



# BAB I

## MANFAAT DAN RELEVANSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

### 1.1 Sejarah dan Perkembangan Perdagangan Internasional

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan sering dikaitkan dengan berlangsungnya transaksi yang terjadi sebagai akibat munculnya problem kelangkaan barang. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan rangkaian kegiatan produksi dan distribusi barang.

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah. Perdagangan laut antara

India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).

Terdapatnya hubungan antarpulau dan hubungan dengan dunia luar ada kecenderungan merupakan hubungan perdagangan. Pada khususnya perdagangan itu terjadi karena pertukaran antara berbagai hasil daerah. Demikian pula perdagangan dalam masa ini sudah barang tentu tidak dapat diartikan sebagai perdagangan seperti kita kenal sekarang ini. Perdagangan pada waktu itu dapat diartikan bagai pertukaran barang dengan barang yang disebut inatura.

Hubungan dagang antarpulau lambat laun berkembang menjadi perdagangan yang lebih luas. Di atas telah dikemukakan, bahwa hubungan antara Indonesia dengan India dan Cina telah berkembang sejak permulaan tarikh Masehi. Salah seorang sarjana Belanda bernama J.C. Van Leur mengemukakan pendapatnya bahwa perdagangan itu telah terjadi dengan dunia luar terlebih dahulu dengan negeri India. Barulah kemudian menyusul dengan negeri Cina.

Anggapan tersebut di atas tidak disertai angka-angka tahun yang pasti, kapan hubungan itu dimulai. Hal tersebut disebabkan karena sumber-sumber yang memberikan keterangan jelas tidak ada. Bahan-bahan keterangan yang didapat hanya berupa buku-buku sastra. Beberapa buku sastra India dan buku-buku lainnya mengungkapkan keterangan yang samar-samar tentang negeri ini. Bahan-bahan tersebut berasal dari sekitar abad ke-2 Masehi, yang antara lain sebagai berikut:

a. Buku Jataka

Kitab ini ditulis oleh penulis India dan berisi ceritera yang menggambarkan tentang kehidupan sang Buddha. Di dalamnya disebutkan nama-nama negeri antara lain sebuah negeri bernama Suvannabhumi. Dalam bahasa Indonesia nama tersebut berarti negeri emas. Dari nama itu ada pula yang menafsirkan letaknya di sebelah timur teluk Benggala. Lalu

kita dapat mengira, apakah nama Suvannabhumi itu identik dengan nama Suwarnabhumi. Hal itu tidak jelas, sedangkan orang sering beranggapan, bahwa Suwarnabhumi sama dengan pulau Sumatera.

b. Buku Ramayana

Buku ini pun ditulis oleh pujangga India, bernama Walmiki. Isinya menceritakan tentang kisah Rama dan Dewi Shinta. Di dalamnya menyebutkan dua nama tempat, yaitu Jawadwipa dan Suwarnadwipa. Jawadwipa berarti pulau Jawa, sedangkan Suwarnadwipa berarti pulau Sumatera.

c. Buku Perinlous tes Erythras Thalasses

Buku ini berasal dari penulis Yunani. Isinya pedoman tentang geografis pelayaran di daerah Samudera Hindia. Di antaranya disebutkan salah satu tempat bernama Chryse. Nama itu berarti emas, yang sering dihubungkan oleh para penulis sekarang dengan nama Suwarnabhumi atau Suwarnadwipa.

d. Buku Geograophike Hypegesis

Penulis buku ini juga seorang bangsa Yunani di Iskandariah bernama Claudius Ptolomeus. Isi buku tersebut sebuah petunjuk tentang membuat peta. Di dalamnya ditemukan nama-nama tempat seperti: Argyre Chora (= negeri perak), Chryse Chora (= negeri emas) dan Chryse Chersonesos (= semenanjung emas). Selain tempat-tempat tersebut ditemukan pula dalam buku itu nama labadiou (= pulau jelai). Para ahli sejarah sering menghubungkan nama labadiou dengan Jawadwipa, yakni pulau Jawa.

Menurut sejarawan Belanda, J.C. Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan dalam pasaran internasional di Asia Tenggara pada waktu itu ialah barang-barang bernilai tinggi, seperti: logam mulia (emas dan perak), perhiasan, barang tenunan, barang pecah belah dan berbagai barang kerajinan, wangi-wangian serta obat-obatan. Selanjutnya menurut keterangan yang bersumber dari

negeri Cina diperkirakan hubungan Indonesia dengan Cina pada masa itu merupakan hubungan langsung antara kedua negara. Atau dapat pula hubungan itu merupakan pelayaran yang lebih luas antara Asia Barat dengan Cina. Menurut O.W. Wolter, pelayaran dagang melalui perairan laut Cina Selatan pertama kali terjadi pada kurun waktu antara abad ke-3 dan ke-5 tarikh Masehi. Kendatipun demikian bukti-bukti yang pasti menunjukkan bahwa pelayaran itu mulai terjadi pada permulaan abad ke-5. Hal itu dapat diikuti dalam uraian berikut:

a. Perjalanan Fa Hien

Fa Hien adalah seorang pendeta agama Buddha. Ia berlayar mengarungi perairan Asia Tenggara sepulangnya dari tempat suci agama Buddha di India. Pengalaman yang diperoleh dalam perjalanannya itu ia catat dan kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku yang diberi judul: "A Record of the Buddhist Religion as practised in India and the Malay archipelago". Dalam catatannya ia katakan, bahwa kapal layarnya terdampar di sebuah pulau bernama ja-ra-di (= Jawadwipa) atau pulau Jawa. Ditambahkannya pula bahwa penduduk setempat banyak yang menganut agama Brahma dan beberapa orang memeluk agama Buddha. Selain dari itu banyak orang memeluk agama berhala.

b. Perjalanan Gunawarman

Gunawarman adalah seorang pendeta Buddha. Ia mengadakan pelayaran langsung dari Indonesia ke negeri Cina. Menurut keterangan yang bersumber kepada berita Cina, Gunawarman bertolak dari sebuah tempat yang disebut Che-po. Nama tersebut sering diidentikkan dengan pulau Jawa.

Menurut O.W. Wolter, hubungan yang terjadi antara Indonesia dengan Cina tidaklah selalu dalam hubungan dagang. Tetapi juga hubungan tersebut terjadi dalam hal yang bersifat keagamaan. Hal itu terbukti seperti kemukakan dalam salah satu

surat yang disampaikan kepada kaisar Cina yang isinya berupa penghargaan kepadanya. Penghargaan itu berisikan pujian karena kaisar telah berjasa dalam pengembangan agama Buddha.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa sebelum abad ke-5 bangsa Indonesia telah memasuki percaturan dunia perdagangan dengan bangsa Cina di daratan Asia. Adapun barang-barang yang diperdagangkan antara lain berupa: kemenyan, kayu cendana, kapur barus, rempah-rempah, bermacam-macam hasil kerajinan dan binatang.

Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

Sejarah perdagangan di Indonesia sudah dimulai dari jaman prasejarah terbukti dengan ditemukannya nekara, manik-manik dan alat-alat logam lainnya yang menyebar dari Sabang hingga Merauke. Perdagangan tersebut terjadi karena adanya permintaan dari penduduk pribumi akan barang tersebut khususnya orang-orang yang dianggap terpandang atau mampu. Atau diperoleh karena adanya sistem persembahan yang biasa disebut dengan sistem resiprokal atau emperion. Sebagai contoh adalah manik-manik kaca Indo-Pasifik yang menyebar di seluruh kawasan Indonesia hingga Pasifik merupakan bukti nyata terjadinya perdagangan antar bangsa dan lebih meningkat berkat adanya hubungan maritim yang dilakukan dengan menggunakan kano atau perahu sejenisnya.

Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di

Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan.

Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, perdagangan antar bangsa semakin meningkat ketika memasuki awal masehi, karena sudah ditemukan pemukiman dan pelabuhan di daerah pesisir sehingga memudahkan dalam pendistribusian barang-barang yang diinginkan. Temuan gerabah Arikamedu dari India di Situs Pacung - Bali Utara merupakan bukti kuat adanya perdagangan antar bangsa yang melibatkan saudagar asing di beberapa wilayah di Indonesia pada awal masehi.

Lokasi yang sangat strategis bagi Indonesia karena terletak pada jalur persilangan lalu lintas perdagangan dunia maka semakin membuat padat jalur perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini memunculkan kerajaan-kerajaan besar dengan pelabuhan laut yang besar pula. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya, Samudra Pasai, Melayu, Singasari, Majapahit, Mataram, Gowa-Tallo hingga Demak Bintoro memiliki pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang asing dan nusantara. Adanya pelabuhan laut tersebut maka mendorong arus distribusi barang berlangsung sangat cepat. Sehingga kebutuhan barang ekspor dan impor semakin meningkat pesat. Barang-barang dagangan yang merupakan komoditi ekspor antara lain: garam, merica pala, adas, cengkeh, kayu gaharu, kayu cendana, damar, kapur barus, gula tebu, pisang, pinang, kapuk, kelapa, gading gajah, kulit penyu, kain sutra dan kain katun. Sedangkan komoditi impor yaitu: kain sutra, payung sutra, pedang, nila, lilin, belanga besi, piring, mangkuk, keramik cina, warangan, tikar pandan, merica, pala, kapur barus, gading, emas, perak dan tembaga. Barang tersebut diperjualbelikan antar pedagang nusantara dan juga pedagang asing yang memasuki perairan nusantara.

Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon.

Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.

Pedagang yang terbesar berasal dari Cina dan Timur Tengah. Mereka menukarkan produk bawaan seperti keramik dengan hasil bumi nusantara khususnya pala dan wewangian yang merupakan komoditi perdagangan terlaris. Permintaan keramik dalam jumlah besar oleh masyarakat lokal merupakan kesempatan yang bagus dalam menjalin tali perdagangan antar bangsa ini. Peningkatan akan barang mewah terbesar terjadi pada masa Kerajaan Majapahit abad XIV yang dipenuhi sutera dan porselin dari Cina. Bahkan dikirim utusan khusus dengan gelar arya atau patih untuk melakukan perdagangan diplomatik dengan Cina. Perdagangan tersebut meningkat lebih pesat lagi ketika ada misi perjalanan Cina yang dipimpin Zheng He (Cheng Ho) yang diutus oleh Kaisar Yongle dari Dinasti Ming untuk memperluas pengaruh Ming di luar perbatasan Cina yang berlangsung antara tahun 1405 - 1433 M. Misi tersebut akhirnya memunculkan kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang terbentuk akibat adanya perdagangan, sehingga menambah ramai arus perdagangan di nusantara pada abad XV. Ramainya perdagangan dan kebutuhan akan rempah, akhirnya memaksa bangsa-bangsa barat melakukan pelayaran sendiri untuk menemukan sumber rempah. Bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda merupakan bangsa Eropa yang mampu menguasai dan melakukan monopoli rempah-rempah di nusantara pada abad XVI - XIX sehingga membesarkan nama Batavia sebagai kota pelabuhan terbesar di Asia.

Besarnya arus perdagangan dan kondisi lingkungan di tambah dengan dinamika perkembangan politik menyebabkan

banyak kapal-kapal dagang tersebut yang tenggelam di tepi pantai atau tengah samudra. Tenggelamnya kapal tersebut disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan disebabkan adanya penyerangan kapal dagang yang tidak mau bersandar atau membayar pajak pelayaran (upeti) di kerajaan yang dilalui, sebagai contohnya adalah kapal-kapal Cina yang melalui Kerajaan Melayu, Aceh, dan Sriwijaya. Penyerangan yang dilakukan oleh bajak laut Cina di Selat Malaka terutama semenjak runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan pudarnya pelabuhan-pelabuhan dagangnya. Penyerangan kerajaan-kerajaan lokal dalam usaha merebut benteng dan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Batavia, Malaka, Maluku, dan Ternate-Tidore yang dikuasai oleh bangsa Belanda, Portugis, dan Spanyol. Unsur ketidaksengajaan disebabkan oleh faktor cuaca yang buruk seperti badai laut, terhantam karang penghalang atau bocornya kapal muatan.

Data kapal tenggelam dengan muatan barang dagangan sudah dapat terdeteksi di sebagian wilayah Indonesia. Temuan-temuan tersebut antara lain di perairan Pulau Ambon, perairan Pulau Bali, Selat Bangka dan Gaspar, perairan Laut Jawa, perairan Halmahera, Kepulauan Riau, Selat Sunda dan perairan Selat Malaka (Pramono, 2005). Kapal tenggelam tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi baik pada saat kapal tersebut sedang beroperasi yaitu dengan muatan barang dagangan antar bangsa dengan mutu terbaik dan setelah kapal tersebut sudah menjadi bangkai kapal yang tenggelam di lautan jika memuat barang dagangan yang memiliki nilai jual yang tinggi di jaman sekarang, misalnya emas, perak atau keramik.

## **1.2 Relevansi dan Manfaat Perdagangan Internasional**

Perdagangan Internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua atau lebih negara. Perdagangan ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan terjadi jika ada kesepakatan antar dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Berikut

adalah beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan Internasional.

a. Penguasaan Ilmu Pengetahuan & Teknologi

Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan IPTEK-nya. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Negara dengan teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang, sedangkan barang yang bukan produk sendiri akan dibeli dari negara lain;

b. Perbedaan Kekayaan Sumber Daya Alam

Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi;

c. Perbedaan Selera

Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan Internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas;

d. Perbedaan Iklim

Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain;

e. Keinginan Memperluas Pasar & Menambah Keuntungan

Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan Internasional. Hal ini merupakan penyebab timbulnya perdagangan internasional;

f. Kelebihan atau Kekurangan Produk dalam Suatu Negara

Kelebihan produk pada suatu negara (*surplus*) dan kekurangan kas dalam suatu negara (*defisit*) adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan lainnya. Terjadinya *surplus* menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain, sedangkan negara yang mengalami *defisit* akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan Internasional.

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

Setidaknya ada beberapa manfaat penting sebagai akibat dilaksanakannya perdagangan internasional, yaitu:

a. Terjalannya hubungan baik antar Negara

Perdagangan internasional membawa dampak yang sangat positif terjalannya hubungan baik antar Negara pelaku perdagangan internasional. Hal ini disebabkan adanya saling ketergantungan di antara Negara-negara;

b. Meningkatkan kemakmuran Negara

Perdagangan internasional menghasilkan dan menambah devisa antar Negara pelaku perdagangan internasional. Akibat devisa yang meningkat maka Negara yang bersangkutan akan meningkat kemakmuran negaranya;

c. Mempermudah pemenuhan kebutuhan rakyat suatu Negara/bangsa

Perdagangan internasional mempermudah dan memperlancar ketersediaan berbagai kebutuhan masyarakat/rakyat suatu Negara/bangsa pelaku perdagangan internasional;

d. Timbulnya saling kerjasama antar Negara

Perdagangan internasional menimbulkan saling kerjasama antar Negara pelaku perdagangan internasional;

e. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri:

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri;

f. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi:

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

g. Memperluas pasar dan menambah keuntungan:

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka

khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

h. Transfer teknologi modern:

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern

Selain keuntungan atau manfaat, ada juga resiko dari perdagangan internasional antara lain:

a. Perbedaan mata uang tiap Negara

Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang Negara pengekspor. Pembayaranannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional;

b. Kualitas Sumber Daya yang Rendah

Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Karena jika sumber daya manusia rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik;

c. Pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar

Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko yang besar. Oleh karena itu negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan L/C.

d. Adanya Kebijakan Impor dari Suatu Negara: Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.

e. Terjadinya Perang:

Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat;

f. Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional

Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasi-organisasi ekonomi. Tujuan organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negaranegara anggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi

tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan.

### 1.3 Teori Perdagangan Internasional

Ada beberapa model perdagangan internasional dan akhirnya membentuk siklus teori dalam perdagangan internasional, di antaranya:

a. Model Ricardian:

Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam Negara;

b. Model Heckscher-Ohlin

Model Heckscher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit, model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal ke dalam teori perdagangan internasional.

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily

Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal;

c. Faktor Spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya.

Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengednalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola perdagangan;

d. Model Gravitasi:

Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

## BAB II

# GLOBALISASI EKONOMI DAN BLOK PERDAGANGAN

### 2.1 Globalisasi Ekonomi, Pro dan Kontra

Globalisasi telah menjadi trend ekonomi dunia. Perekonomian dunia semakin terbuka dan menjadi satu kesatuan ekonomi global. Globalisasi merupakan suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi dan ekonomi yang melampaui garis batas teritori suatu negara. Globalisasi membuat proses produksi dan konsumsi produk menjadi suatu jaringan internasional yang melibatkan banyak negara. Salah satu bentuk globalisasi ekonomi adalah terbentuknya perusahaan global yang semakin berkembang di ekonomi global, seperti IBM, Coca Cola, Sony, Toyota, dll.

Perkembangan globalisasi memperoleh dukungan maupun penolakan yang berkembang dimasyarakat. Para pendukung globalisasi menganggap dengan adanya globalisasi akan membawa kemakmuran pada ekonomi dunia secara keseluruhan karena

adanya spesialisasi produk yang ekonomis untuk masing-masing negara.

Sedangkan yang menentang globalisasi berpendapat bahwa globalisasi membawa implikasi perdagangan bebas yang dapat mematikan perusahaan domestik pada saat belum mampu untuk bersaing.

Dorongan-dorongan yang menciptakan globalisasi ekonomi meliputi:

a. Dorongan Pasar

Pasar dunia merupakan pasar yang sangat potensial. Hal ini mendorong perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan pasar global dan memperoleh keuntungan yang maksimal;

b. Dorongan Biaya

Perusahaan global mencari Negara-negara yang mampu memberikan biaya produksi relatif murah dan mengkombinasikan berbagai produk dari beberapa negara sehingga akan meminimalkan biaya produksi. Dorongan untuk meminimalkan biaya produksi ini mendorong banyak perusahaan untuk menjadi perusahaan global;

c. Dorongan Politik

Adanya perjanjian antar negara seperti APEC, AFTA, MEE, NAFTA semakin memberikan fasilitas dan mempermudah perkembangan globalisasi ekonomi global;

d. Dorongan Persaingan

Adanya persaingan yang semakin ketat baik di pasar domestik dan pasar internasional mendorong banyak perusahaan untuk memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang paling murah walaupun harus berasal dari berbagai negara sehingga akan mampu bersaing dengan perusahaan lain;

e. Dorongan Teknologi Informasi: Faktor perkembangan teknologi dan informasi mendorong semakin cepatnya globalisasi terjadi. Fasilitas Transportasi, internet, dan telepon

yang memadai akan menjadikan globalisasi berkembang dengan cepat.

Faktor Globalisasi:

a. Kemajuan teknologi dan informasi

semakin memperdekat jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dengan pesawat jet dan peralatan telephon serta internet orang akan mudah bertemu dan bertatap muka secara cepat walaupun terpisah jarak yang jauh;

b. Lokasi

Globalisasi mendorong perusahaan bisnis untuk menggunakan banyak tempat sebagai tempat usaha maupun pemasaran produk mereka;

c. Sikap

Globalisasi mendorong perubahan sikap yang semakin terbuka dan berbaurnya budaya dan perilaku dari berbagai negara membentuk budaya global.

Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendorong sebuah perusahaan memperluas bisnisnya ke pasar internasional:

a. Keuntungan potensial

Globalisasi semakin membuka pasar ke seluruh dunia dan memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar;

b. Profit margin

Globalisasi semakin mempermudah perusahaan untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi dari berbagai negara dengan harga murah sehingga biaya produksi dapat ditekan. Hal ini akan meningkatkan profit margin penjualan produk perusahaan;

c. Permintaan Konsumen yang stabil dan kuat

Pasar globalisasi menjanjikan konsumen dari berbagai negara sehingga penjualan produk tidak hanya tergantung pada suatu negara. Sehingga apabila penjualan satu negara turun dapat ditutupi dari penjualan di negara lain;

d. Bahan baku

Globalisasi juga memudahkan perusahaan yang tidak memiliki bahan baku di negara asal dan mencarinya dari negara lain;

e. Teknologi

Salah satu tujuan globalisasi perusahaan adalah untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing;

f. Efisiensi usaha

Globalisasi mendorong efisiensi produksi dan usaha karena penggunaan input proses produksi yang minimal berasal dari berbagai negara di dunia.

Keberhasilan perusahaan dalam pasar luar negeri sebagian besar ditentukan oleh cara-cara bisnis tersebut dalam menanggapi hambatan sosial ekonomi, hukum dan politik yang terdapat dalam perdagangan internasional.

a. Perbedaan Sosial dan Budaya

Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan masyarakat sekaligus budaya negara tersebut dengan negara asalnya. Beberapa produk harus melakukan penyesuaian menurut bahasa, kebiasaan, adat istiadat dan budaya negara bersangkutan. Sebagai contohnya McDonald di Indonesia meluncurkan burger dengan varian saus McSatay, yang diadaptasi dari bumbu sate, sejenis makanan tradisional Indonesia;

b. Perbedaan Ekonomi

Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dan perbedaan sistem ekonomi dapat memengaruhi operasional bisnis internasional. Sebagai contoh negara Perancis menganut ekonomi campuran, akan berperan sangat besar dalam industri penerbangan dimana mereka ikut terlibat dalam aspek rancangan pesawat sekalipun. Di Indonesia sendiri yang menganut sistem ekonomi Pancasila pemerintah tidak mengizinkan swasta asing untuk menguasai bisnis yang menguasai hajat hidup dan kepentingan orang banyak;

c. Perbedaan Hukum dan Politik

Pemerintah suatu negara dapat memengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam beberapa hal. Mereka dapat menciptakan kondisi (persyaratan) tertentu untuk melakukan bisnis di wilayah hukum mereka atau bahkan melarang suatu jenis bisnis sama sekali.

Secara kumulatif, liberalisasi menjadi revolusi kebijakan di negara-negara berkembang dan negara yang mengalami transisi. Sebelum 1980-an, 80% dari populasi dunia di luar Barat tinggal di negara-negara berkembang akibat sangat tingginya tingkat proteksi eksternal, selain besarnya intervensi pemerintah. Pada pertengahan 1990-an, sebagian besar orang-orang ini menikmati sistem ekonomi yang lebih terbuka, baik secara domestik maupun internasional. Rata-rata tarif yang diterapkan di negara-negara berkembang menurun dari hanya di bawah 30% pada tahun 1985 menjadi hanya di bawah 11% pada tahun 2005.

Liberalisasi dimulai di Jepang, dan kemudian Korea Selatan dan Taiwan, pada 1950-an, pada saat sebagian besar negara berkembang lain memberlakukan rezim substitusi impor dan intervensi negara. Negara-negara ini mengalami perkembangan ekonomi tinggi dengan mempertinggi ekspor melalui liberalisasi selektif, sembari mempertahankan perlindungan impor dan pembatasan investasi. Kemudian, mereka secara bertahap meliberalisasi impor dan FDI. Hong Kong kembali memberlakukan

perdagangan bebas dan keterbukaan investasi setelah Perang Dunia Kedua. Singapore mengikuti dalam waktu kemudian, meskipun sempat terjebak dalam proteksi (ketika menjadi bagian dari Federasi Malaysia). Negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya (Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina) melakukan liberalisasi perdagangan dan penanaman modal asing secara signifikan sejak tahun 1970-an. Negara-negara di kawasan Indocina mulai menerima pasar bebas secara bertahap pada 1980-an. Vietnam mempercepat liberalisasi perdagangan dan investasi asing dalam rangka persyaratan keanggotaan WTO pada 2006.

Tiongkok sebenarnya mulai menunjukkan minat liberalisasi pada 1978, namun secara signifikan perubahan kebijakan baru nyata sejak awal 1990-an. Semenjak itu Tiongkok berputar haluan dari sistem ekonomi yang tertutup menuju liberalisasi perdagangan, bahkan menggunakan formula yang begitu liberal untuk ukuran negara sedang berkembang. Sistem tarif ditekan hingga 5% dan secara keseluruhan, tarif telah turun rata-rata menjadi 42% pada tahun 1992 dan menjadi 5% pada saat diterima menjadi anggota WTO.

Titik puncak reformasi Tiongkok adalah aksesi WTO pada tahun 2001. Komitmennya terhadap WTO jauh lebih kuat dibandingkan negara berkembang lain. Hal ini berlaku atas penataan tarif barang (termasuk pertanian); pengurangan hambatan tarif jasa dan perdagangan (seperti jasa keuangan, telekomunikasi, ritel, transportasi dan sejumlah layanan profesional yang dibuka untuk persaingan asing); penetapan segala macam aturan untuk meningkatkan transparansi dan mempromosikan kompetisi, dan meninjau prosedur administratif dan yudisial untuk memastikan bahwa komitmen WTO dilaksanakan di dalam negeri.

Di Asia Selatan, Sri Lanka merintis liberalisasi perdagangan pada akhir 1970. Negara ini menghapus sistem perencanaan ekonomi bergaya Soviet dan menghapus hambatan tarif. Pada tahun 1991, tarif telah diturunkan hingga 16% dari besaran 125%. Di Amerika Latin, Chile mempelopori perdagangan

bebas secara radikal pada akhir 1970-an. Meksiko mengikuti pada 1980-an, dan kemudian Brazil, Argentina, dan Peru pada dekade 1990-an.

Afrika tertatih-tatih melaksanakan liberalisasi perdagangan pada 1980an akan tetapi kemudian tumbuh cepat pada 1990-an. Afrika Selatan mempelopori kebijakan yang besar semenjak dan setelah berakhirnya apartheid. Negara-negara Eropa Timur dan semenanjung Balkan mengalami dentuman besar setelah menghapus sistem ekonomi komando menjadi sistem ekonomi pasar sejak 1989, yang diikuti perubahan kebijakan secara massif dalam sektor perdagangan dan arus modal asing. Namun liberalisasi perdagangan tersendat-sendat justru terjadi di Rusia, sekalipun beberapa negara bekas Soviet seperti Rumania, Bulgaria, dan Georgia, serta bekas Yugoslavia telah mempercepat kebijakan liberalisasi perdagangan.

Akhirnya, liberalisasi perdagangan dan investasi di negara-negara OECD telah terjadi dalam langkah-langkah kecil sejak 1980-an' sesuatu yang tidak mengejutkan, karena sebagian besar telah melakukan liberalisasi dilakukan sejak 1950-an dan 1960-an. Pengecualian adalah Australia dan Selandia Baru. Setelah lebih dari satu abad mempertahankan proteksionisme, keduanya secara tegas menggabungkan diri ke perekonomian dunia pada 1980-an.

Krisis politik biasanya membuka kesempatan untuk melakukan liberalisasi ekonomi. Sebagai contoh apa yang terjadi di Chile 1973-1974, Meksiko (1986), Brazil dan Argentina (awal 1990-an), Afrika Selatan (pertengahan 1990-an), Rusia (akhir 1980-an), Sri Lanka (1977), India (1991), dan Australia serta Selandia Baru (1983-1984). Tetapi faktor krisis ini harus dicermati kembali.

- a. *Pertama*, krisis dapat direspon dengan 2 cara: kadang-kadang menuju liberalisasi, kadang-kadang dengan cara lain, seperti yang terjadi selama Depresi Besar pada 1930-an, dan, pada tingkat lebih rendah, pada tahun 1970 setelah guncangan harga minyak;

- b. *Kedua*, tiap-tiap pemerintah bertindak dengan cara yang berbeda dalam menanggapi guncangan eksternal yang sama;
- c. *Ketiga*, krisis dapat memicu beberapa reformasi, tetapi tidak menjamin keberlanjutan reformasi tersebut. Itulah salah satu perbedaan utama antara Eropa Timur dan negara-negara Balkan, di satu sisi, dan Rusia dan negara bekas Uni Soviet, di sisi lain;
- d. *Keempat*, ada negara yang mengalami liberalisasi besar tanpa krisis ekonomi seperti di Asia Timur.

Kepentingan juga menentukan reformasi dan liberalisasi perdagangan. Pada kenyataannya, kepentingan politisi, birokrat, pengusaha, dan serikat buruh acapkali menjadi dalil untuk menolak di negara-negara berkembang dari tahun 1930-an hingga 1970-an. Sebagian besar negara ini diuntungkan dengan proyek padat modal. Sistem lisensi di India adalah inkarnasi paling terkenal. Di banyak negara, krisis digunakan untuk mengatasi kepentingan kelompok oposisi dan mendorong liberalisasi (seperti yang terjadi di India pada tahun 1991).

Di beberapa negara lain, godaan proteksionisme telah menghentikan atau memperlambat liberalisasi. Ini adalah kasus di Rusia, Ukraina dan negara bekas Uni Soviet lainnya. Di tempat lain, keterbukaan radikal telah memicu pergeseran ekonomi dalam mendukung perekonomian dunia. Kepentingan proteksionis tradisional telah melemahkan pilihan kebijakan lain telah muncul. Eksporir telah mandiri, perusahaan multinasional yang didukung oleh jaringan produksi global, dan kota-kota dan daerah berusaha untuk menjadi magnet bagi perdagangan dan FDI.

Faktor kelembagaan tidak dapat diabaikan. Pertama, terdapat negara-negara berkembang yang telah mengalami pertumbuhan lebih cepat (dalam hal pendapatan per kapita dan indikator pembangunan manusia) setelah liberalisasi dan menggabungkan diri dengan globalisasi dibandingkan negara-negara berkembang

lainnya. Mereka memiliki hambatan perdagangan dan FDI yang lebih rendah, rasio yang lebih tinggi perdagangan dan FDI terhadap PDB, dan kemampuan ekonomi yang lebih baik. Mereka juga memiliki kelembagaan yang bagus: penegakan hak milik dan kontrak (yaitu *rule of law*), baik melalui pengadilan maupun birokrasi, pasar keuangan diatur lebih baik, budaya kompetisi yang lebih kuat, mengurangi korupsi dan sebagainya. Faktor ini yang menjadi jurang pemisah antara Chile dan beberapa negara Amerika Latin lainnya, Eropa Timur, Asia Utara-Timur dan Tenggara Macan Asia, dan sejumlah kecil negara-negara Afrika (Mauritius, Botswana, dan Afrika Selatan). Namun ada keanehan di Tiongkok dan India. Keduanya masih menjadi negara-negara berpenghasilan rendah dengan faktor kelembagaan yang lemah. Perbaikan kelembagaan telah terjadi, tetapi telah tertinggal jauh di belakang pergeseran kebijakan besar - perdagangan tidak sedikit lebih rendah dan ada pembatasan FDI.

## **2.2 Blok Perdagangan dan Lembaga Keuangan Internasional**

Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak artinya, dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan swasta.

Kerja sama ekonomi internasional adalah kerja sama yang menunjukkan hubungan antarnegara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerja sama tersebut berada di bawah pembinaan dan pengawasan salah satu badan PBB yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC = Economic and Social Council), karena ECOSOC merupakan badan PBB yang

mengoordinasikan pekerjaan-pekerjaan di bidang ekonomi dan sosial. Badan ini berada di bawah pengawasan Majelis Umum (General Assembly) yang bertugas memberi rekomendasi dalam menangani masalah pembangunan, perdagangan, kependudukan, industri, konservasi energi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan bentuknya, kerja sama ekonomi internasional terbagi dalam 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut.

a. Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contoh: kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan sebagainya;

b. Kerja Sama Ekonomi Regional

Kerja sama ekonomi regional adalah kerja sama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh: kerja sama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), antara negara-negara di kawasan Eropa (MEE), antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik (APEC), dan sebagainya;

c. Kerja Sama Ekonomi Multilateral/Internasional

Kerja sama ekonomi multilateral adalah kerja sama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Kerja sama ini bisa dalam satu kawasan seperti ASEAN, MEE tetapi dapat pula kerja sama antarnegara yang berbeda kawasan seperti OPEC, WTO, dan IMF;

d. Kerja Sama Ekonomi Antarregional

Kerja sama ekonomi antarregional yaitu kerja sama ekonomi di antara dua kelompok kerja sama ekonomi regional. Contoh: kerja sama antara MEE dengan ASEAN.

Badan kerja sama ekonomi regional antara lain kerja sama Negara kawasan Eropa (EEC) dan negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

a. EEC (European Economic Community) atau MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa)

EEC atau MEE adalah suatu kerja sama antara negara-negara Eropa untuk menciptakan keselarasan anggota-anggotanya dalam hal ekonomi, sosial, dan kestabilan politik di Eropa. EEC didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 oleh Sembilan negara dengan tujuan untuk bekerja ke arah pengembangan aktivitas ekonomi yang serasi, ekspansi berkesinambungan dan seimbang, pemantapan stabilitas, memacu peningkatan standar kehidupan, dan ikatan lebih erat di antara sesama anggotanya.

Selain EEC, masyarakat Eropa juga membentuk organisasi lainnya, yaitu: ECSC (European Coal and Steel Community) atau Masyarakat Batu bara dan Baja Eropa, dan EAEC (European Atomic Energy Community) atau Masyarakat Tenaga Atom Eropa.

b. ASEAN (Association of South East Asian Nations)

ASEAN atau persatuan negara-negara Asia Tenggara merupakan suatu kerja sama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN adalah:

- a. mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya,
- b. mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara,
- c. menciptakan kerja sama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Kerja sama ekonomi internasional antara lain terdiri atas badan-badan dunia dalam wadah organisasi PBB. Badan-badan tersebut di antaranya sebagai berikut.

a. IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional

Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan Konferensi di Bretton Woods, Amerika. Dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. Tujuan IMF antara lain:

- a. memajukan kerja sama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga (IMF),
- b. memperluas perdagangan dan investasi dunia,
- c. memajukan stabilitas kurs valuta asing,
- d. mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional,
- e. menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan jangka menengah,
- f. memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran;

b. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) atau Bank Dunia (World Bank)

IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usahausaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang

produktif. Jadi, IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi internasional;

c. ITO (International Trade Organization) atau WTO (World Trade Organization)

WTO atau organisasi perdagangan dunia merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional dengan cara membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional;

d. GATT (General Agreement on Tariff and Trade)

GATT atau persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan didirikan atas dasar perjanjian di Jenewa, Swiss dengan maksud untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan-rintangan perdagangan internasional, khususnya tarif dan bea cukai tinggi yang menghambat ekspor impor antar negara. Prinsip yang mendasari terbentuknya GATT adalah:

- a. asas *The Most Favourite Nation* atau nondiskriminasi, artinya setiap fasilitas (terutama keringanan bea masuk bagi barang tertentu) yang diberikan kepada suatu Negara anggota harus diberikan pula kepada semua Negara anggota GATT lainnya;
- b. asas resiprositas (saling menguntungkan), artinya apabila suatu negara mendapat keringanan dari negara anggota lain, sebagai imbalannya negara tersebut juga harus memberikan keringanan kepada negara anggota lainnya.

e. ILO (International Labour Organization)

ILO atau organisasi buruh sedunia yang didirikan 11 April 1919 dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi, sosial dan menyusun hukum perburuhan;

f. IFC (International Finance Corporation)

IFC atau Badan Keuangan Internasional didirikan pada tanggal 24 Juli 1956. Badan ini memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Jadi, IFC bertugas memupuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggota, melalui pemberian kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta dan pemerintah tanpa jaminan.

g. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

UNCTAD atau konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan didirikan dengan maksud mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain-lain. Selain itu juga menyalurkan serta melancarkan perundingan internasional mengenai ekspor impor antara negara industry dengan negara yang sedang berkembang, atau sering disebut 'Dialog Utara Selatan';

h. IDA (International Development Association)

IDA atau Perhimpunan Pembangunan Internasional didirikan tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat. IDA bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negaranegara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat yang ringan;

i. FAO (Food and Agricultural Organization)

FAO atau organisasi pangan dan pertanian ini didirikan tanggal 16 Oktober 1945 dengan tujuan untuk memajukan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengairan, sistem bercocok tanam, dan lain-lain;

j. UNDP (United Nations Development Program)

UNDP atau program pengembangan PBB merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia, dan menangani program pengalihan teknologi;

k. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

UNIDO atau organisasi pengembangan industri PBB didirikan dengan tujuan untuk pengembangan industry seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada, dan lain-lain;

l. APO (Asian Productivity Organization)

Didirikan pada tahun 1961 dengan maksud untuk meningkatkan peranan produktivitas dan pengembangan ekonomi, serta untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu khususnya pertanian dan perindustrian;

m. ADB (Asian Development Bank)

ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan dengan tujuan meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang;

n. CGI (Consulative Group on Indonesia)

CGI didirikan pada bulan Maret tahun 1992. CGI merupakan kelompok beberapa negara yang memberi bantuan kepada Indonesia sebagai pengganti IGGI tanpa Belanda di dalamnya;

o. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)

APEC didirikan pada bulan November 1989, merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik Selatan (negara sedang berkembang) dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerja sama APEC dewasa ini mencakup 3 (tiga) program kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan (Trade Liberalization);
- b. Program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi (Trade and Investment Facilitation Program);
- c. Program kerja sama pembangunan (Development Cooperation Program) di antaranya termasuk program bantuan teknik.

p. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEC atau organisasi negara-negara pengeksport minyak didirikan pada tahun 1960, dengan tujuan:

- a. menghimpun negara-negara penghasil dan pengeksport minyak;
- b. menjaga kestabilan harga minyak;
- c. menghindarkan persaingan antara negara penghasil minyak;

d. berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia.

q. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)

OECD atau kerja sama ekonomi antarnegara berkembang, didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kestabilan ekonomi anggota-anggotanya dan membantu negara-negara berkembang;

r. AFTA (Asean Free Trade Area) atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara

AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia;

s. EFTA (European Free Trade Association)

Badan atau asosiasi perdagangan bebas Eropa ini bertujuan untuk bekerja sama dalam perdagangan dan pajak untuk barang-barang industry;

t. NAFTA (North American Free Trade Agreement)

NAFTA atau persetujuan perdagangan bebas Amerika Utara ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tariff maupun nontariff;

u. IDB (Islamic Development Bank)

IDB atau Bank Pembangunan Islam ini didirikan pada tanggal 23 April 1975, dengan tugas utama untuk membantu negaranegara

anggota, yaitu negara-negara Islam dalam meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Iuran dan setoran anggota IDB dinyatakan dalam satuan ID (Islamic Dinar);

v. ASEM (Asia Europe Meeting)

Kerja sama ASEM ini berdiri tahun 1996, oleh 25 negara. ASEM merupakan forum kerja sama negara Asia dan Eropa untuk memelihara perdamaian secara global, stabilitas, dan kemakmuran yang bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi lebih besar antara dua kawasan dengan melihat liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilitasi di antara negara anggota.

Negara peserta perdagangan internasional, menggagas bidang-bidang kerjasama lain dengan Negara sesama pelaku perdagangan internasional, di antaranya:

a. Kerjasama di bidang pertahanan

Organisasi seperti NATO yaitu salah satu organisasi yang dilakukan sama di bidang pertahanan. Pola sebelum Negara-negara komunis eropa timur memiliki Negara-negara merdeka terdapat organisasi historia warsawa yang merupakan aksi sama bidang pertahanan Negara-negara komunis terutama di Europe timur;

b. Kerja sama di aspek produksi

Kerja sama di sini dilakukan oleh Negara-negara produsen barang tertentu untuk mengontrol flukruasi harga, mutu barang, pembatasan jumlah produksi (kuato), perlindungan hukum, persaingan serta pemasaran. Misalnya Negara-negara produsen minyak membentuk kerja persis dalam wadah organisasi OPEC;

c. Kerjasama di bidang keuangan

Untuk kepentingan di bidang moneter internasional, Negara-negara yang mengoperasikan perdagangan internasional suatu

semasa sangat memerlukan bantuan moneter internasional dalam menyelesaikan kendala defisit/surplus neraca pembayarannya lalu menjaga stabilitas moneter internasional dengan membentuk IMF, IFC, dan ADB;

d. Kerjasama di bidang perburuhan

Bagi melindungi hak dan tugas pekerja di setiap Pelosok dibentuk serikat-serikat kerja kemudian untuk kepentingan kebersamaan di dalam dunia internasional dibentuk organisasi buruh/pekerja internasional, yaitu ILO (Internasional Labour Organization);

e. Kerjasama di aspek perdagangan dan tariff

Agar agar perdagangan dapat berjalan lannnnnnncar dantidak ada hambatan-hambatan sebab proteksionisme yang dijalankan dengan suatu Negara terhadap Negeri lain maka Negara-negara yang melakukan perdagangan membentuk organisasi yang disebut GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang kemudian beralih, berganti, bersalinbertukar menjadi WTO (World Investment Organization). Apabila ada pelanggaran dalam perdagangan dunia yang dilakukan oleh suatu Negeri WTO amempunyai wewenang utk menindaknya dan menyalurkannya pada hokum internasional.

### Tujuan Kerjasama Ekonomi Internasional

a. Memajukan Perdagangan Internasional

Setiap negara yang memiliki perekonomian terbuka berupaya memajukan kegiatan perdagangan internasionalnya. Kemajuan perdagangan ini meraih dilihat dari peningkatan quantity ekspor dari waktu ke waktu. Dengan ikut juga dalam suatu organisasi perdagangan, Indonesia dapat mengetahui peraturan-peraturan atau tata perdagangan internasional sehingga dapat memperluas occurir ekspor tanpa melanggar regulasi tersebut;

b. Mempercepat Pembangunan

Menggunakan kerja sama ekonomi, negara-negara berkembang memiliki kesempatan bagi membangun perekonomiannya. Negara bertumbuh menerima investasi dari pelosok maju dan bantuan modal dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Lender Pembangunan Asia, dan lembaga-lembaga ekonomi di bawah naungan PBB;

c. Mengurangi Keterbelakangan

Negara-negara miskin pada umumnya bukan memiliki potensi sumberdaya yang dapat menjadi modal pembangunan mereka. Sumber daya tersebut seumpama sumber daya alam, modal, dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Kekurangan sumber daya tersebut adalah penyebab kondisi keterbelakangan misalnya keterbatasan kualitas pendidikan, lingkungan dan kesehatan manusia, juga tingkat penguasaan teknologi produksi. Melalui kerja sama redovisning, negara-negara miskin memiliki harapan untuk memperoleh bantuan moneter secara cuma-cuma. Bahkan, yang dilakukan sama ekonomi juga dapat menggalang solidaritas dunia internasional agar memberikan perhatian jauh untuk mengurangi angka kemiskinan dunia;

d. Meningkatkan taraf hidup

Kerja sama ekonomi antarnegara dapat mendorong munculnya seluruh usaha atau industri, yang mampu menciptakan lapangan aksi dan mengurangi pengangguran hingga dapat memberikan pendapatan ataupun penghasilan bagi masyarakat. Selain itu kebutuhan akan barang atau jasa juga meraih terpenuhi dengan adanya kerjasama ekonomi. Contohnya, melalui aksi sama ekonomi Indonesia-Jepang, penduduk Jepang dapat memenuhi keperluan gas LNG yang diimpor dari Indonesia. Demikian jua masyarakat Indonesia mampu menyanggupi kebutuhan akan barang-barang navigation yang diimpor dari Jepang.

## BAB III

# INDONESIA DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

### 3.1 Perdagangan Internasional Sebelum Era Reformasi

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).

Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar

sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi:

- a. Hak mencetak uang;
- b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. Hak menyatakan perang dan damai;
- d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri;
- e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti *verplichte leverentie* (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC) dan *contingenten* (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak *extirpatie* (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negeri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Di samping itu juga diterapkan *Preangerstelstel*, yaitu kewajiban menanam tanaman

kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.

Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengeksport perak ke Hindia Belanda untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbalan, ekspor perak itu tetap perlu dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.

Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh:

- a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro;
- b. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar;
- c. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri;
- d. Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

Maka, VOC diambil-alih (digantikan) oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental stelstel oleh Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC yang kini terhambat oleh blokade Inggris di Eropa. Sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan

Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain:

- a. Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan);
- b. Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi;
- c. The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.

Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain:

- a. Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak;
- b. Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit;

- c. Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram—yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan—dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).

Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka

datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai lebih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada:

- a. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah;
- b. Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut;
- c. Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengalihan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai sesuai memenangkan perang Pasifik.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:

- a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga;
- b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI;

- c. Kas negara kosong;
- d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain:

- a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946;
- b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia;
- c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan;
- d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947;
- e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif;
- f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957), karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*.

Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:

- a. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun;
- b. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi;
- c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi;
- d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah;

- e. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain:

- a. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan;
- b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%;
- c. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

### **3.2 Politik Ekonomi Setelah Era Reformasi**

Perdagangan internasional yang dilakukan antarnegara akan menghasilkan peraturan-peraturan perdagangan internasional berupa kebijakan-kebijakan perdagangan internasional, tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, premi, subsidi, diskriminasi harga, dan dumping.

Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain disebut ekspor, sedangkan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain disebut impor, kegiatan demikian itu akan menghasilkan devisa bagi negara.

Devisa merupakan masuknya uang asing kenegara kita yang dapat digunakan untuk membayar pembelian atas impor dan jasa dari luar negeri.

Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.

Untuk melindungi produksi dalam negerinya dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong/melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan devisa negara.

Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor.

Barang modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. Produk impor Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu.

Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lain adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barang industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. Dalam bidang jasa Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu atau produk-produk asing (ke dalam pasar domestik) ke dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya melarang impor daging sapi yang mengandung penyakit Anthrax. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi.

Pada dasarnya ada tiga sasaran kebijakan larangan impor, yaitu:

a. Kebijakan Larangan Impor Berorientasi Lingkungan Hidup;

Pemerintah suatu negara dapat melarang impor produk tertentu apabila produk tersebut berbahaya bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan di suatu negara, atau karena produk itu merupakan hasil eksploitasi sumber daya alam hingga merusak keseimbangan ekologi.

Di Indonesia, terdapat beberapa produk yang dilarang masuk ke Indonesia karena berbahaya bagi lingkungan hidup, antara lain limbah plastik (Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003), *Pestisida etilen dibromida*, Limbah B3 kecuali item tertentu, Udang spesies *Penaeus Vanamae* (Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Kelautan dan Perikanan), dan produk susu dan olahan susu dari Cina. Akan tetapi, pada Agustus 2008 muncul berita bahwa Pemerintah akan mengizinkan impor limbah plastik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku murah bagi industri, karena menurut data Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia, selama semester pertama 2008 harga bahan baku plastik polyethylene dan polypropylene naik 100 persen dari US\$ 1.100 menjadi US\$ 2.200 per ton. Sedangkan pelarangan impor udang spesies *Penaeus Vanamae* adalah karena di pasar internasional beredar udang jenis ini yang terserang penyakit.

Produk susu dan olahan susu dari Cina juga masuk dalam daftar larangan impor di 31 negara lain, menyusul terjadinya skandal susu bermelamin di Cina. pada akhir September 2008, dilaporkan susu bermelamin telah menimbulkan 94.000

korban, termasuk 4 bayi meninggal karena kerusakan ginjal. Pada tahun 2004, terjadi kasus malnutrisi anak-anak di Cina Daratan, akibat susu yang tidak mengandung protein. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kandungan protein. Nampaknya, perusahaan-perusahaan susu di Cina menambahkan melamin dalam susu agar seakan-akan susunya mengandung protein yang tinggi. WHO menyebutkan bahwa ini adalah salah satu skandal keamanan makanan paling besar dalam beberapa tahun terakhir. Setelah terungkapnya skandal ini di dunia Internasional, reputasi ekspor makanan asal Cina menjadi jelek, dan tercatat 11 negara menghentikan seluruh impor produk susu dan olahan susu dari Cina Daratan.

b. Kebijakan Larangan Impor Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri;

Dalam kondisi normal, suatu anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan kuantitatif untuk impor dan ekspor sebagaimana diatur dalam pasal XI GATT 1994. Namun demikian, dalam kondisi tertentu negara anggota dapat melakukan *safeguard measures* sebagai langkah guna melindungi industri domestik dari kerugian yang disebabkan peningkatan impor. Terdapat dua kondisi untuk menerapkan *safeguards measures*, yakni:

- a. Terjadi peningkatan impor dibandingkan produksi barang sejenis di dalam negeri.
- b. Peningkatan impor tersebut mengancam dan mengakibatkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan negara tersebut dapat melakukan penyesuaian atas produk tertentu yang menghadapi tekanan yang berasal dari impor barang yang diakibatkan terjadinya persaingan atau kompetisi secara internasional. *Safeguards measures* bersifat sementara dan

semata-mata dilakukan dalam rangka proses penyesuaian bagi industri domestik yang menghadapi tekanan. *Safeguards measures* tidak dapat digunakan untuk memproteksi industri domestik dalam jangka panjang.

c. Menjaga Balance of Payments

Apabila negara anggota WTO menghadapi kesulitan neraca pembayaran (*balance of payments/BOP difficulties*), maka negara anggota tersebut dapat menerapkan pembatasan atas perdagangan jasa yang menyebabkan timbulnya komitmen termasuk pembayaran atau transfer yang berkaitan dengan komitmen tersebut. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengecualian tersebut dapat diberlakukan adalah:

- a. Perekonomian negara berkembang tersebut lemah, sehingga hanya dapat menyokong standar kehidupan yang rendah.
- b. Dalam tahap awal pembangunan;
- c. Mengalami kesulitan BOP sebagai akibat dari kebijakan membuka pasar domestik dan perubahan persyaratan perdagangan (*terms of trade*).

Kebijakan larangan impor demi industri lokal di Nigeria tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai akan merugikan industri sendiri. Pihak industri sendiri menyatakan bahwa seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana menyediakan infrastruktur bagi mereka, daripada melakukan pelarangan impor. Misalnya dalam kasus industri baja, untuk mencegah perusahaan-perusahaan baja gulung tika, maka pemerintah Nigeria harus menyediakan tenaga listrik sekitar 70-80 megawatt. Dengan melakukan pelarangan impor, pemerintah telah menciptakan pasar bagi produk lokal, tapi industri lokal sendiri kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar.

Akibatnya, terjadi kelangkaan, rendahnya kualitas produk dan mahalnnya harga barang-barang, sehingga konsumen menjadi korban dari kebijakan ini.

Faktanya, walaupun berneraca surplus dalam perdagangan internasional, tapi Nigeria terbelit utang, sebagai akibat dari ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan sektor minyak yang padat modal dan harga produknya sangat fluktuatif. Negeri ini sempat menikmati masa kejayaan harga jual minyak pada tahun 1980-an, sehingga membuat GDP Nigeria menembus US\$81 miliar pada tahun 1985, namun angka GDP terus melorot menjadi US\$40,5 miliar saja pada 1995. Akibatnya, Nigeria menanggung beban utang luar negeri yang tak tertanggungkan yakni US\$1,7 miliar per tahun untuk mencicil utang dan bunganya yang semakin membesar, atau sekitar separuh dari nilai yang harus dibayarkan. Selain anjloknya harga minyak sejak tahun 1980-an, tingkat korupsi yang tinggi juga menyebabkan keadaan ekonomi Nigeria memburuk (*Transparency International* mencantumkan Nigeria sebagai negara terkorup ketiga se-dunia).

Dalam perkembangan berikutnya, WTO berhasil mendorong Nigeria untuk menghapuskan hambatan impornya dalam delapan tahun program eliminasi. (WTO 1998). Sebagaimana dapat dilihat pada *Implementation of the Year 2008 Fiscal Policy Measures and Tariff Amendments* yang dikeluarkan *Budget Office Nigeria*, bahwa larangan impor dialihkan ke hambatan tarif impor yang cukup tinggi, khususnya untuk produk-produk yang dapat ditemukan di dalam negeri

Dumping adalah praktik menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga di pasar domestik (harga normal). Praktik dumping telah dilakukan sejak adanya perdagangan internasional, yang merupakan salah satu bentuk kebijakan diskriminasi harga untuk mengoptimalkan keuntungannya. Dengan kebijakan dumping, keuntungan akan dioptimalkan karena pasar semakin luas ke luar negeri, akumulasi barang yang tidak terjual dapat diatasi, monopoli domestik dapat

dipertahankan, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan keuntungan.

Bagi eksportir untuk melakukan praktik dumping untuk meningkatkan pangsa pasar (dumping market expansion), menghilangkan pesaing untuk memonopoli pasar (dumping predatory), melepaskan persediaan karena bersepeda berlebihan (dumping), dan dapatkan mata uang asing (dumping perdagangan negara).

Mengapa praktik dumping dilakukan? Pasti ada alasan untuk mendorong eksportir untuk melakukan dumping. Memang, ada cukup alasan di balik praktik dumping ini. Beberapa diantaranya adalah:

- a. Dapatkan keuntungan maksimal melalui diskriminasi harga dengan mengekspor atau menjual produk atau komoditas ke negara lain dengan harga murah dibandingkan dengan harga produk yang dijual ke negara-negara pengekspor dan pengimpor;
- b. Mencegah akumulasi stok barang di pasar domestik karena kelebihan produksi sehingga diekspor atau dijual di luar negeri dengan harga rendah;
- c. Memonopoli pasar dengan melumpuhkan dan bahkan mematikan bisnis pesaing dengan menghancurkan pasar dengan menjual produk-produk berharga murah, sehingga pesaing yang tidak kuat dalam modal dan strategi akan runtuh sendiri. Dengan jatuhnya pesaing, produsen dapat menguasai pangsa pasar sehingga lebih mudah untuk memainkan harga, meskipun pada awalnya mereka harus menanggung kerugian jangka pendek.

Sebagai strategi persaingan yang dianggap tidak sehat, harus diakui bahwa praktik dumping memang bermanfaat sekaligus merugikan. Keuntungan dari praktik dumping dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Memenuhi kebutuhan produk atau komoditas antar negara. Ada kalanya suatu negara mengalami kekurangan produksi komoditas tertentu, sehingga impornya mencukupi di negara tersebut. Di sisi lain, ada negara-negara yang mengalami surplus dalam produksi komoditas sehingga mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga pasar luar negeri melalui kegiatan ekspor. Menjual komoditas ke pasar luar negeri dengan harga rendah tidak selalu merupakan praktik dumping dengan konotasi negatif. Adanya perbedaan pasar antara negara pengimpor dan eksportir dapat mempengaruhi harga jual yang lebih murah.
- b. Dapat memperluas dan meningkatkan pangsa pasar. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak pemain di sektor ekonomi, terutama di ranah internasional. Ini menimbulkan persaingan yang ketat, sehingga upaya untuk mencapai dan memperluas pasar semakin sulit. Praktik dumping sebenarnya dapat memperluas dan meningkatkan pangsa pasar. Harga produk yang lebih rendah yang ditawarkan ke pasar asing mampu menarik perhatian importir untuk terlibat dalam transaksi perdagangan internasional.
- c. Meningkatkan pendapatan valuta asing untuk negara-negara pengekspor. Pembayaran produk dalam perdagangan internasional dilakukan dalam mata uang asing. Praktik dumping yang mampu meningkatkan pangsa pasar menunjukkan lebih banyak pendapatan valuta asing atau mata uang asing yang diperoleh atau masuk ke negara-negara pengekspor.

Meskipun memiliki kelebihan, praktik dumping juga berisiko menimbulkan kerugian. Sebenarnya, kerugian dari praktik dumping ini tidak hanya menyerang negara pengimpor, tetapi juga eksportir. Berikut ini adalah kerugian yang timbul dari praktik dumping.

a. Merusak harga produk sejenis

Harga ekspor komoditas yang lebih rendah dari harga produk domestik serupa dari negara pengimpor dapat mengakibatkan diskriminasi harga. Ini jelas merugikan produsen yang bersaing di negara pengimpor;

b. Menggulingkan produsen pesaing baik di dalam maupun luar negeri

Praktik dumping yang dianggap sebagai manifestasi persaingan tidak sehat dapat ditujukan untuk menggulingkan bisnis pesaing baik di dalam maupun luar negeri. Harapannya adalah dengan menjual produk ke pasar internasional dengan harga lebih murah, eksportir dapat merebut pangsa pasar;

c. Eksportir terancam bangkrut

Sebenarnya kerugian dari praktik dumping tidak hanya dirasakan oleh produsen yang bersaing di negara pengimpor, tetapi juga eksportir. Penjualan produk atau komoditas dengan harga lebih rendah tidak dapat menutupi biaya produksi yang dikeluarkan.

Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (*custom area*). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik. Tarif dikategorisasi sebagai berikut:

a. Tarif atau Bea Masuk

Tarif atau bea masuk merupakan pajak yang dikenakan pada barang impor, hal ini merupakan salah satu cara untuk melindungi produksi dalam negeri dari serbuan produk impor. Di samping itu, pengenaan tarif dapat memberikan peluang bagi produsen dalam negeri untuk bersaing dengan barang impor sehingga mereka bisa meningkatkan produksinya. Produsen dalam negeri beruntung karena mereka bisa menjual lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi. Namun, bagi konsumen dalam negeri akan dirugikan karena mereka harus membayar lebih tinggi dari harga sebelum adanya tarif. Tarif cenderung menaikkan harga, menurunkan jumlah yang dikonsumsi dan diimpor, serta menaikkan produksi domestik. Kebijakan tarif ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kebijakan Tarif Barrier. Kebijakan tarif Barrier (TB) dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut:
  - a. Tarif rendah antara 0-5%. Tarif rendah dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, misalnya beras, mesin, dan alat-alat militer.
  - b. Tarif sedang antara 5-20. Tarif sedang dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi dalam negeri.
  - c. Tarif tinggi di atas 20%. Tarif tinggi dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri.
- b) Kebijakan Nontarif Barrier. *Nontariff Barrier* (NTB) merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Secara garis besar NTB dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Pembatasan Spesifik (*Specific Limitation*)

Pembatasan spesifik terdiri atas larangan impor secara mutlak, pembatasan impor atau kuota sistem,

peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan pertahanan dan keamanan negara, peraturan kebudayaan, perizinan impor serta embargo.

b. Peraturan Bea Cukai (*Custom Administration Rules*)

Peraturan bea cukai terdiri atas tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan *forex* dan pengawasan devisa, dan pungutan administrasi.

c. Campur Tangan Pemerintah

Campur Tangan pemerintah terdiri atas kebijakan pemerintahan, subsidi, dan insentif ekspor, *contervalling duties*, *domestic assistance*, *programs* dan *trade diverging*.

b. Kuota

Kuota merupakan batasan terhadap jumlah barang yang boleh diimpor oleh suatu negara dari semua negara-negara tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Ada dua macam kuota yaitu sebagai berikut.

a) *Kuota Impor*

a. *Absolut* atau *unilateral quota* yaitu kuota yang ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain;

b. *Negotiated* atau *bilateral quota* yaitu kuota yang ditentukan atas perjanjian antara dua negara atau lebih;

c. *Tariff quota*, yaitu gabungan antara tarif dan kuota.

b) *Kuota Ekspor*

Tujuan kuota ekspor adalah sebagai berikut.

- a. Mencegah barang-barang yang penting berada di tangan musuh;
- b. Agar barang-barang di dalam negeri terjamin dalam proporsi yang cukup;
- c. Untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilisasi harga.

c. Larangan Ekspor

Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah suatu negara melarang total semua ekspor komoditas tertentu. Tujuannya adalah agar industri bertambah, membuka kesempatan kerja baru, dan memberantas penyelundupan;

d. Larangan Impor

Larangan impor merupakan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu. Larangan impor ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan demikian, barang produksi dalam negeri terlindungi dari masuknya barang impor sejenis;

e. Subsidi

Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan yang hasil produksinya berorientasi ekspor. Dengan demikian, biaya produksinya menjadi rendah, sehingga harga jualnya lebih murah, murahannya harga barang tersebut mampu bersaing di pasaran internasional. Subsidi ini biasanya dilakukan dalam bentuk modal, keahlian, mesin-mesin, peralatan, keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, dan subsidi harga;

f. Premi

Premi merupakan penambahan dana (dalam bentuk uang) kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi (prestasi) yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya premi dan subsidi kepada produsen dalam negeri, diharapkan harga jual barang lebih murah sehingga terjangkau masyarakat, hasil produksi meningkat dan kelangsungan hidup (kontinuitas) perusahaan terjaga;

g. Diskriminasi Harga

Diskriminasi harga merupakan penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama. Dengan adanya diskriminasi dimaksudkan agar ada pengawasan terhadap harga jual dan harga beli sehingga elastisitas permintaan dapat diketahui;

h. Dumping

Dumping merupakan kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menguasai pasaran internasional.

Sebelum uang menjadi alat tukar resmi dalam melakukan transaksi, kita mengenal sistem barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan dua pihak tanpa menggunakan perantara uang atau alat bayar lainnya. Sederhananya, barter adalah transaksi yang dilakukan melalui penukaran barang dengan barang atau jasa dengan barang. Walau secara nilai finansial bisa saja tidak berimbang, namun masing-masing pihak yang terlibat telah menyepakatinya di awal dan biasanya keuntungan yang didapatkan didasari oleh asas manfaat yang tepat.

Barter merupakan salah satu bentuk penunjang transaksi perdagangan awal saat manusia belum menemukan uang sebagai alat tukar. Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga tahun 6000 SM (Sebelum Masehi). Konon, sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat suku Mesopotamia. Sistem ini kemudian diadopsi oleh orang Fenisia yang menukarkan barang-barang mereka kepada orang-orang di kota-kota lain yang terletak di seberang lautan.

Pada perkembangannya, sistem barter yang lebih baik dikembangkan di Babilonia. Pada masa itu, berbagai barang bisa digunakan sebagai standar barter, semisal tengkorak manusia. Barang lain yang populer digunakan untuk pertukaran adalah garam. Barter bermula saat manusia menghadapi kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Demi mendapatkan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, manusia pun mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Maka terjadilah sistem transaksi barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Barter menjadikan manusia lebih selektif dalam mendapatkan barang sehingga kualitas barang bisa terjaga dengan baik.

Namun, kendala pada umumnya dalam sistem barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu kemudian mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu yang dinilai berharga sebagai alat tukar.

Setelah itu, muncullah era uang. Jack Weatherford dalam buku *History of Money* (1997) berpendapat bahwa uang pertama kali diciptakan dan digunakan oleh bangsa atau orang-orang dari Kerajaan Lydia. Bangsa Lydia diperkirakan pernah hidup di kawasan yang kini menjadi wilayah Turki. Uang pada masa mereka konon berwujud koin dengan gambar singa yang mengaum. Weatherford meyakini bahwa masyarakat Lydia sudah mengenal uang dan memakainya sebagai alat tukar sejak sekitar tahun 1.000

SM. Sedangkan Donald B. Clane punya versi berbeda. Dalam buku *Rationality and Human Behavior* (1999), ia menyatakan dalam teorinya bahwa mata uang koin pertama kali ditemukan 6.000 tahun lalu di wilayah yang kini berdiri negara Turki. Namun, Clane tidak menyinggung perihal bangsa Lydia seperti yang diyakini Weatherford.

Seiring berjalannya waktu, muncul pula uang yang dibuat dari kertas. Sebagian sejarawan meyakini uang kertas mulai digunakan oleh masyarakat kerajaan Tiongkok Kuno pada tahun 100 Masehi. Berabad-abad berselang, bangsa-bangsa Eropa baru mengenal jenis uang ini setelah Marco Polo kembali dari ekspedisinya ke Tiongkok.

Kemajuan teknologi juga berdampak terhadap perkembangan jenis alat tukar selain uang. Pada 1946, kartu kredit mulai diperkenalkan sebagai alat tukar pengganti uang atau yang bisa disebut sebagai transaksi nontunai. Di era serba digital dan internet seperti sekarang, muncul lagi jenis alat tukar terbaru, yakni bitcoin. Bitcoin adalah uang elektronik yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto sejak tahun 2009. Saat ini, 1 bitcoin setara dengan hampir 8 ribu dolar AS.

Ada tiga jenis barter yang umum dilakukan masyarakat dan negara, antara lain:

a. Barter langsung

pertukaran barang dengan barang yang terjadi secara langsung;

b. Barter alih

barter yang terjadi ketika suatu negara yang sedang melakukan barter tidak dapat memanfaatkan barang hasil dari barternya sehingga mengalihkannya ke negara yang lain;

c. Barter imbal beli

barter yang terjadi karena adanya kerjasama untuk saling membeli barang atau jasa yang dibutuhkan satu sama lainnya.

### Kelebihan sistem barter

- a. Manusia akan mengenal satu sama lain karena akan sering bertemu untuk bertukar barang. Penerapan sistem akan membuat seseorang lebih banyak bernegosiasi dan berkomunikasi dengan orang lain;
- b. Memunculkan sikap toleransi yang besar sesama manusia sebab masing-masing pihak berusaha untuk membantu pihak lain memenuhi kebutuhannya.

### Kekurangan sistem barter

- a. Barang yang ditukarkan harus dibawa ke mana-mana sampai seseorang menemukan pihak lain yang memiliki barang yang ia butuhkan. Namun, belum tentu orang lain tersebut mau menukarkan barangnya dengan barang lain;
- b. Jika jumlah atau ukuran barang yang akan ditukarkan berukuran besar, misalnya sapi, tentu akan sulit untuk dibawa ke mana-mana untuk ditukarkan;
- c. Untuk melakukan transaksi barter, kedua belah pihak harus memiliki kerelaan sehingga menjadi salah satu kekurangan dari sistem barter karena belum tentu yang satu juga menginginkan barang yang ditukarkan;
- d. Kelemahan barter lainnya adalah barang yang ditukar sulit untuk dipecah-pecah. Misalnya, ketika seseorang hanya memiliki seekor kambing untuk ditukarkan dengan beras, maka tidak mungkin kambing harus dipotong-potong terlebih dahulu.

Counter Trade merupakan pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Jenis-jenis counter trade, di antaranya:

a. Direct Barter:

Sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau lazim disebut dengan denominator of value suatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan. Pertukaran langsung barang dan / atau jasa antara dua pihak tanpa transaksi tunai. Merupakan pengaturan counter trade paling ketat. Digunakan terutama untuk satu-satunya transaksi penawaran dengan mitra dagang yang tidak dapat dipercaya;

b. Switch Barter:

Sistem ini dapat diterapkan bilamana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya;

c. Counter Purchase:

Suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut;

d. Buy Back Barter:

Suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. Terjadi ketika sebuah perusahaan membangun pabrik di negara pasokan teknologi atau, peralatan, pelatihan, atau jasa lainnya kepada negara-dan setuju untuk mengambil persentase tertentu dari output pabrik sebagai pembayaran parsial untuk kontrak;

e. Offset:

Mirip dengan counterpurchase sejauh satu pihak setuju untuk membeli barang dan jasa dengan persentase tertentu dari hasil penjualan asli. Perbedaannya adalah bahwa offset bisa memenuhi kewajiban dengan perusahaan di negara mana penjualan sedang berlangsung.

Generalized System of Preference adalah kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima. Negara pemilik program GSP bisa bebas menentukan negara mana dan produk apa yang akan diberikan pemotongan bea masuk impor.

## BAB IV

### PENUTUP

Praktek perdagangan internasional di era global tidak dapat dihindari, terlebih bagi Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Dalam setiap kerja sama perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain harus mengandung prinsip saling menguntungkan. Beberapa dampak positif perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

#### a. Mendorong dan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia akan dapat mendorong tumbuhnya industri-industri dalam negeri untuk mengembangkan usahanya sehingga akan mempercepat pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Perdagangan internasional akan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran akan suatu produk. Hal inilah yang mendorong bertumbuhnya industri-industri dalam negeri. Sebagai contoh, berkembangnya industri batik, kerajinan, dan industri tekstil;

b. Meningkatkan Pendapatan Negara

Melalui perdagangan internasional akan diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Semakin besar ekspor kita maka semakin besar pula devisa yang diperoleh. Dengan meningkatnya pendapatan negara maka pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan kebutuhan negara akan dapat terpenuhi;

c. Memperluas Lapangan Pekerjaan

Adanya perdagangan internasional dapat meningkatkan permintaan akan suatu produk. Hal inilah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya industri-industri dalam negeri sehingga terciptalah lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri;

d. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Adanya perdagangan internasional akan dapat memperluas lapangan kerja dalam negeri, dan banyak masyarakat yang dulunya sulit mencari pekerjaan/menjadi pengangguran sekarang dapat bekerja dan mempunyai penghasilan. Dengan berpenghasilan, masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti kesejahteraan hidupnya meningkat;

e. Meningkatkan Kualitas Produksi

Mengingat banyaknya persaingan dari negara-negara lain dalam perdagangan internasional maka hal itu mendorong setiap negara untuk meningkatkan kualitas produk ekspornya agar bisa laku di pasar internasional dan menang dalam persaingan. Demikian juga dengan negara kita, agar dapat bersaing dengan negara lain maka Indonesia mau tidak mau juga dituntut selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan standar mutu internasional dengan cara menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksinya sehingga dapat bersaing dan laku di pasar internasional. Misalnya dengan mengganti peralatan/mesin industri dengan yang lebih modern dan berteknologi;

f. Memajukan Dunia Perbankan dan Lembaga Keuangan Lain

Dampak positif lain dengan adanya perdagangan internasional adalah semakin majunya lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, karena bagaimanapun dalam perdagangan internasional akan melibatkan lembaga keuangan untuk membantu memperlancar dan mempermudah transaksi dalam pembayaran dalam negara lain. Misalnya, mengatasi perbedaan alat pembayaran antarnegara.

Dalam setiap kerja sama perdagangan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral tentu saja selain mempunyai dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatif perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut

a. Kelangsungan Hidup Produk Dalam Negeri Teracam

Kelangsungan hidup produksi dalam negeri dapat terancam karena perdagangan internasional dapat membuka peluang dan kesempatan masuknya produk luar negeri ke dalam negeri sehingga bagi produk dalam negeri yang kualitasnya rendah tentu akan kalah bersaing dan tidak laku di pasaran. Sedangkan produk luar negeri yang proses pembuatannya lebih maju dan modern tentu saja kualitasnya lebih baik akan laku dan menguasai pasaran.

b. Menyempitnya Pasar Produk Dalam Negeri

Dengan masuknya produk luar negeri ke dalam negeri tentu akan mengurangi pasar di dalam negeri. Sehingga pasar dalam negeri yang semula dikuasai oleh produk dalam negeri, perlahan-lahan akan dapat digeser dan dikuasai oleh produk luar negeri.

c. Hancurnya Industri Dalam Negeri

Bagi industri kecil yang kemampuan modalnya kecil dan daya saingnya rendah sudah pasti akan kalah bersaing dengan

pengusaha asing. Akibatnya banyak pengusaha dalam negeri yang bangkrut atau menutup usahanya. Maka untuk mencegah hal ini pemerintah melakukan proteksi guna melindungi produksi dalam negeri dari serbuan produk-produk luar negeri.

d. Meningkatnya Pengangguran

Banyaknya perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar karena kalah bersaing dengan perusahaan asing yang menjual produknya di Indonesia, mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang di-PHK sehingga menyebabkan pengangguran meningkat dan daya beli masyarakat menurun.

e. Terjadinya Utang Luar Negeri

Dalam perdagangan internasional apabila ekspor negara kita lebih kecil daripada impor, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya hutang luar negeri. Padahal untuk membayar hutang tersebut Indonesia harus membayar dengan devisa, akibatnya devisa Indonesia berkurang dan perekonomian dalam negeri akan terganggu.

Daya saing (*competitiveness*) merupakan sebuah konsep multidimensional. Dapat dilihat dari tiga tingkatan yang berbeda: negara (*country*), industri, dan tingkat perusahaan. Daya saing (*competitiveness*) berasal dari bahasa Latin, *competer*, yang berarti keterlibatan dalam sebuah pasar persaingan. Daya saing menjadi istilah umum untuk menjelaskan kekuatan ekonomi dari sebuah entitas yang berhadapan dengan pesaingnya dalam ekonomi pasar global dimana barang, jasa, penduduk, keahlian, dan ide bergerak dengan bebas melintasi perbatasan geografi. Tingkat daya saing perusahaan (*firm level competitiveness*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan dalam mendisain, memproduksi dan atau keunggulan produk pasar terhadap barang yang ditawarkan pesaing, dalam hal kualitas harga dan non harga.

Penstudi politik ekonomi sepakat bahwa kemakmuran sebuah negara diciptakan, tidak diwarisi. Kemakmuran tidak bertumbuh dari sebuah warisan sumber daya sebuah negara. Kemakmuran tidak didapat dari kumpulan dan serikat tenaga kerja (*labor pool*), tingkat suku bunga, nilai mata uang sebagaimana yang dipercayai oleh ekonomi klasik. Tingkat daya saing sebuah negara tergantung pada kapasitas industrinya berinovasi dan memutakhirkan diri (*upgrade*). Perusahaan mendapat keuntungan dari pesaing terbaik di bumi ini karena tekanan dan tantangan. Mereka mendapat keuntungan karena mempunyai pesaing domestik yang kuat, pesaing lokal yang agresif (*strong domestic rivals*), dan pelanggan lokal yang loyal (*demanding local customers*). Keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) diciptakan dan berkelanjutan melalui sebuah proses yang dilokalisir. Perbedaan dalam nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah, semua berkontribusi pada kesuksesan kompetitif. Perlu diketahui tidak ada sebuah negara yang akan kompetitif dalam semua jenis industri. Jelasnya, sebuah Negara berhasil dalam industri tertentu karena lingkungan merupakan forward-looking, dinamis dan menantang.

Global Competitiveness Index (GCI) merupakan laporan tahunan yang telah disusun oleh Executive Chairman WEF, Profesor Klaus Schwab sejak tahun 1979. Metode tersebut kemudian dikembangkan di tahun 2005 oleh Xavier Salai Martin dan sejak saat itu metode dan berbagai hasil laporan GCI ditemukan dan diumumkan.

Untuk laporan tahun 2017-2018, WEF mengungkapkan bahwa pihaknya menggunakan 12 pilar untuk mengukur daya saing yang menjadi penentu dari pertumbuhan jangka panjang dan faktor esensial dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. 12 pilar tersebut diantaranya adalah Insitusi (*Institutions*), Infrastruktur (*Infrastructure*), Lingkungan Makroekonomi (*Macroeconomic Environment*), Kesehatan dan Pendidikan Primer (*Health and Primary Education*), Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Keterampilan (*Higher Education and Training*), Efisiensi Pasar Barang (*Goods*

*Market Efficiency*), Efisiensi Pasar Tenaga Kerja (*Labour Market Efficiency*), Pengembangan Pasar Finansial (*Financial Market Development*), Kesiapan Teknologi (*Techological Readiness*), Besaran Pasar (*Market Size*), Kepuasan Berbisnis (*Business Sophistication*) dan Inovasi (*Innovations*).

Oleh karena itu WEF menganggap bahwa laporan ini dapat menjadi bantuan bagi pada pengambil keputusan dalam mendesain kebijakan yang lebih baik. Sebab keputusan yang baik harus didasarkan pada kolaborasi pihak swasta dan publik. Sehingga mampu untuk menjadi upaya mengembalikan rasa percaya diri dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena perubahan ekonomi.

Sebagaimana pernah dilansir WEF, sebanyak 137 negara masuk dalam daftar GCI dan Indonesia bertengger di peringkat 36. Peringkat ini merupakan peningkatan dari peringkat tahun sebelumnya yang menempatkan Indonesia diposisi 41. Hebatnya, posisi Indonesia tersebut secara ekonomi dinilai lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang selama ini telah dikenal sebagai negara maju seperti Brazil (peringkat 80), Rusia (peringkat 38), Italia (peringkat 43) ataupun Turki (peringkat 53). WEF menilai bahwa Indonesia telah berhasil untuk meningkatkan performanya dalam berbagai pilar walaupun peringkat ini diraih didapat dari keunggulan besaran pasar yang berada di peringkat 9 dunia, dan kekuatan makroekonomi yang menempati peringkat 26 dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga dinilai sebagai negara yang berada di peringkat atas dalam hal inovasi di negara-negara berkembang. Namun sayangnya, Indonesia masih terbilang buruk dalam kesiapan teknologi dan efisiensi pasar tenaga, WEF menempatkan Indonesia dalam peringkat 80 dan 96 dunia.

Cerminan hasil politik ekonomi atau kebijakan ekonomi sebagaimana diungkap melalui survey oleh WEF di atas adalah cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu Negara di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran rakyatnya. Macam-macam jenis politik ekonomi:

a. Politik moneter

kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan dan perkreditan negara. Contohnya kebijakan mengenai jumlah uang yang beredar, dan tinggi rendahnya suku bunga;

b. Politik fiskal

kebijakan pemerintah dalam bidang mengatur kebijakan negara, naik di bidang anggaran maupun perpajakan;

c. Politik produksi

kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan peningkatan produksi dalam negeri dengan menggunakan sumber-sumber alam secara efisien;

d. Politik perdagangan luar negeri

kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekspor impor, neraca pembayaran, utang luar negeri, kurs valuta asing, dan kerja sama internasional;

e. Politik harga dan upah

kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian harga-harga barang dan upah yang merupakan bagian penting dalam usaha stabilitas dalam bidang ekonomi;

f. Politik sosial dan ketenagakerjaan

merupakan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan penciptaan kesempatan kerja, hubungan tenaga kerja, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Demikian strategis posisi Indonesia di antara banyak negara pelaku perdagangan Internasional, pemerintah tampaknya sangat konsern memposisikan diri dalam perannya dalam perdagangan internasional maupun nasional. Kepentingan nasional tampaknya tidak begitu saja mudah diabaikan. Artinya pelibatan kepentingan nasional harus tetap didahulukan manakala Negara membuka kebijakan politik ekonominya melibatkan diri dalam kancah

perdagangan internasional. Hal ini terlihat dari butir-butir penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai berikut:

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 1994. Arbitrase Komersial Internasional. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 2005. Hukum Perdagangan Internasional. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- , 2004. Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. 1995. Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional. Penerbit RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- AK, Syahmin. 2005. Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wiranata, I Gede AB. 2009 Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Penerbit Universitas Lampung, Bandarlampung.
- , 2012. Hukum Perdagangan Internasional (Kajian Hukum dan Ekonomi). Penerbit Universitas Lampung, Bandarlampung.
- , 2019. Kontrak & Sengketa Serta Model Penyelesaiannya (Kajian Awal). Penerbit Aura Publisher. Bandarlampung

